

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses peningkatan output dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan perekonomian, terutama untuk menganalisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan suatu daerah atau negara. Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.²

Pertumbuhan ekonomi dikatakan mengalami peningkatan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun.³ Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang menunjukkan peningkatan berarti menggambarkan perekonomian negara tersebut berkembang dengan baik.

Begitupun di Indonesia, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Saat ini Indonesia sangat fokus dalam meningkatkan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun ekonominya.⁴ Selama tahun 2019-2021 Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar Rp. 2.625,0 triliun dan kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 2.703,1 triliun. Kemudian pada tahun 2021

² Athaillah Abubakar, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.1 No.3 Tahun 2015.

³ Nadia Ika Purnama, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Medan Tahun 2000-2014, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 15 No.1 Tahun 2015, hal. 71.

⁴ Kompas.com, “ Tahun 2021 Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya Tumbuh 4,7 Persen” Dalam <https://money.kompas.com/read/2021/06/20/090400726/tahun-2021-ekonomi-indonesia-diproyeksi-hanya-tumbuh-4-7-persen?page=all>, diakses 21 Juni 2021.

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar Rp. 2.683,1 triliun. Kondisi tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Indonesia Triwulan I Tahun
2019-2021
(Triliun Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, data diolah)⁵

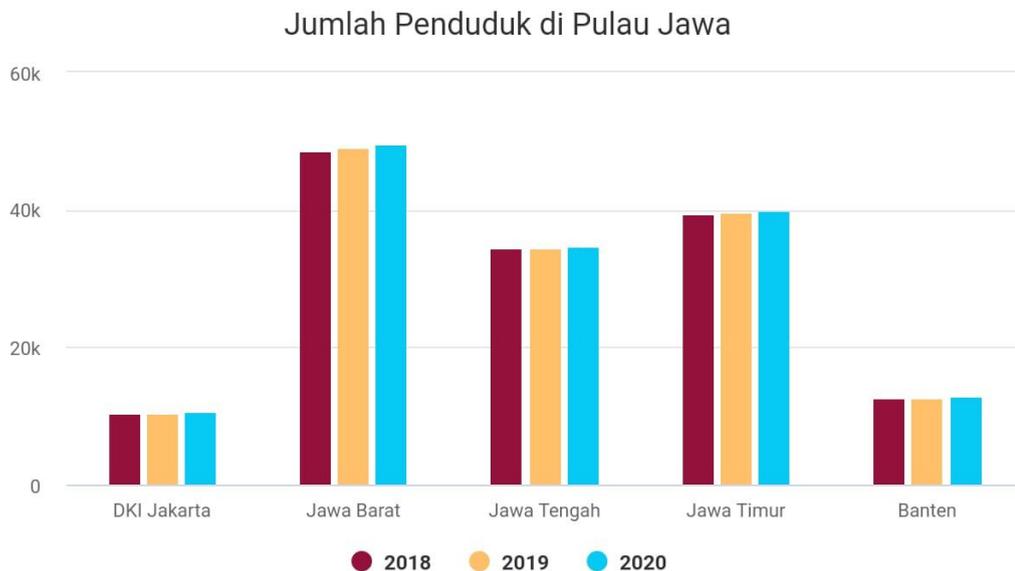
Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu negara. Meski Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara besar, namun jumlah penduduk yang ada di negara tersebut juga besar maka tingkat kemakmuran suatu negara dikategorikan rendah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sollow Swan, jika suatu negara menyisihkan sebagian besar pendapatannya ketabung dan investasi maka negara itu akan memiliki ketersediaan modal *steady state* dan tingkat pendapatan yang tinggi. Dan sebaliknya Sollow Swan juga memprediksi bahwa negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita yang rendah.⁶

⁵<https://bps.go.id>, diakses pada 22 Juni 2021 pukul 06.11 WIB.

⁶ Rudi Masniadi, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, dan Investasi Terhadap Tingkat Pendapatan Perkapita Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2012, hal. 71.

Pulau Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak dengan populasi sebesar 269 603,4 juta jiwa.⁷ Pulau Jawa adalah pulau yang menjadi tempat tinggal lebih dari 60% populasi Indonesia. Jumlah penduduk tertinggi di Pulau Jawa pada 5 Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2018-2020
(Ribuan Jiwa)



*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS, data diolah)*⁸

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan dari tahun 2018-2020. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat merupakan jumlah penduduk tertinggi di Pulau Jawa tahun 2020 yaitu sebesar 49. 565,2 ribuan jiwa, diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta masing-masing 39.955,2 ribuan jiwa, 34.738,2 ribuan jiwa, 12.895,3 ribuan jiwa dan 10.576,4 ribuan jiwa. Dapat dilihat Provinsi Banten juga termasuk Provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi ke 4, meskipun tergolong Provinsi

⁷<https://bps.go.id>, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 10.58 WIB.

⁸<https://bps.go.id>, diakses pada 25 Juni 2021 pukul 10.58 WIB.

yang baru terbentuk pada tahun 2000 dan merupakan pecahan dari wilayah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Adam Smith *An inquiry into the nature and causes of the nation*, teori yang dibuat dengan teori *the invisible hands*, teori pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.⁹ Menurut Todaro yang menyatakan bahwa semakin besar angkatan kerja, yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi maka semakin besar pula pendapatan nasional dan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.¹⁰ Dan dengan bertambahnya penduduk akan memperluas pangsa pasar sehingga mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Untuk mengetahui angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dengan lebih jelas, maka dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.3

Perkembangan Angkatan Kerja yang Bekerja di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Banten (BPS, data diolah)¹¹

⁹ Fatma Dayuning Chatami, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 1991-2012*, (Surakarta: Skripsi thesis).

¹⁰ Vina Lulu Chasanah, *Pengaruh Faktor Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2015-2019*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH Banten.

¹¹<https://bps.go.id>, diakses pada 24 April 2021 pukul 11.42 WIB.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat dan Banten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat berjumlah 20.779.888 jiwa, sedangkan Provinsi Banten berjumlah 5.332.496 jiwa. Pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat sebesar 21.902.958 jiwa dan di Provinsi Banten sebesar 5.562.846 jiwa. Dan di tahun 2020 juga mengalami peningkatan tenaga kerja sebesar 21.674.854 jiwa di Provinsi Jawa Barat dan 5.552.172 jiwa di Provinsi Banten.

Jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi bila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, namun disisi lain, penduduk bertambah akan menambah jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Jadi dapat dikatakan penduduk yang bekerja dalam suatu daerah dapat mempengaruhi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah selain itu juga menggambarkan nilai tambah suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.¹² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten diperoleh data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

¹² Dessy Cahya Kartika, *Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang Periode 2007-2016*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak di terbitkan, 2018), hal. 3.

Gambar 1.4
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi Banten 2018-2020
(Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Banten (BPS, data diolah)¹³

Dari tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dalam data yang disajikan dalam tabel terlihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku masing-masing Provinsi mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2018 PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.962.231,58 miliar, sedangkan di Provinsi Banten sebesar Rp. 614.906,61 miliar. Dan pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 2.125.167,99 miliar, untuk Provinsi Banten sebesar Rp. 664.963,40 miliar. Dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.088.038,74 miliar untuk Provinsi Jawa Barat, sedangkan Provinsi Banten sebesar Rp. 626.437,44 miliar. Kenaikan dan penurunan tersebut dapat terjadi karena terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan

¹³<https://bps.go.id>, diakses pada 24 April 2021 pukul 11.43 WIB.

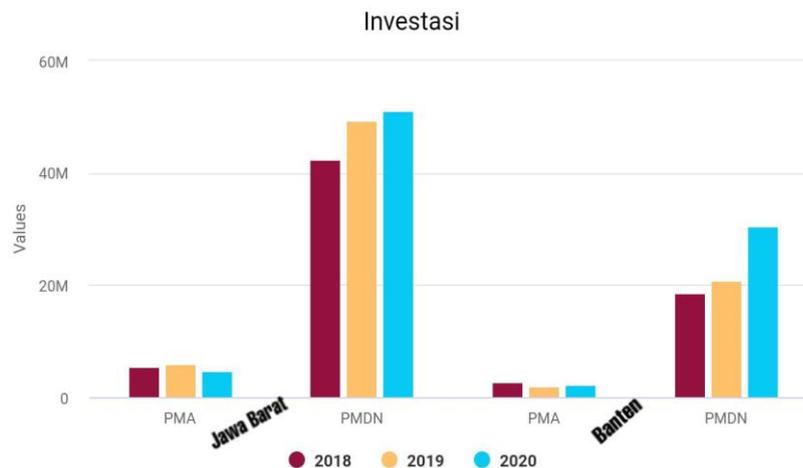
Provinsi Banten. Faktor yang dimaksud antara lain adalah tanah, sumber daya alam, sumber daya manusia, ketersediaan modal, dan peran pemerintah. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor tanah, kekayaan lain, selain itu jumlah serta mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi yang dicapai oleh suatu masyarakat, sistem sosial dan sikap masyarakat.¹⁴

Pertumbuhan modal Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten antara lain tercermin dari adanya investasi. Investasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah modal yang berasal dari pemerintah. Sedangkan investasi swasta adalah penempatan sejumlah modal yang berasal dari perusahaan swasta. Investasi swasta terbagi menjadi dua yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).¹⁵ Investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) akan mempertinggi tingkat penanaman modal dan selanjutnya akan mempercepat pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Untuk melihat perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁴ Dhita Nur Elia Fitri, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1984-2013, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.2 No. 2 Tahun 2014.

¹⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empris*, (Yogyakarta: Garaham Ilmu, 2004), hal. 166.

Gambar 1.5
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Barat
dan Provinsi Banten Tahun 2018-2020
(Juta Rupiah)



Sumber: BKPM Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, (data diolah)¹⁶

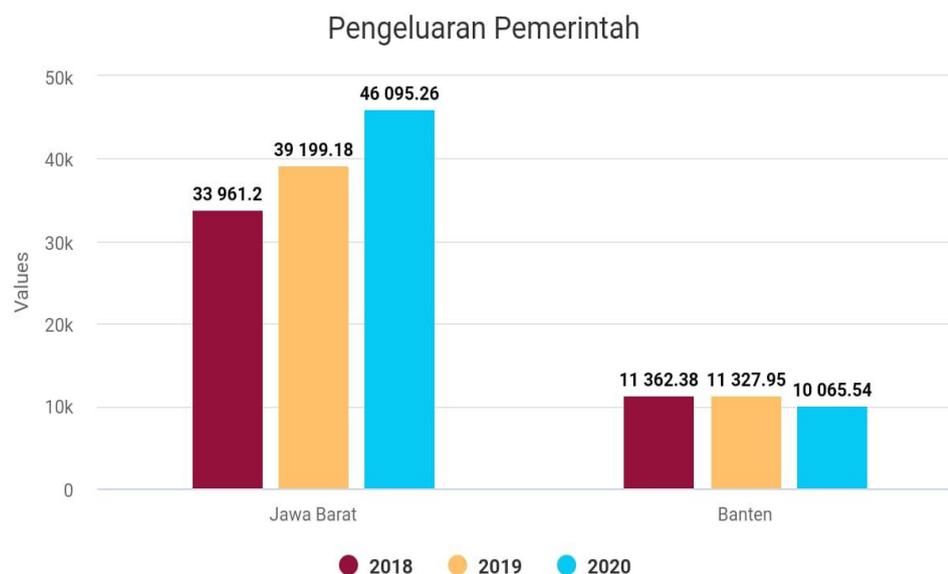
Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa selama tahun 2018- 2020 investasi PMDN di Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Selama 3 tahun terakhir investasi PMDN di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan tinggi terutama pada tahun 2020 yaitu mencapai Rp. 50.958.166,7. Nilai investasi PMA selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.573.520,1. Untuk tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.881.045,4 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.783.690,5. Kemudian untuk investasi PMDN di Provinsi Banten selama tahun 2018-2020 juga mengalami peningkatan dan yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.409.997,2. Nilai investasi PMA Provinsi Banten mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2019 PMA Provinsi Banten mengalami penurunan yang rendah sebesar Rp. 1.868.191,9.

Selain investasi, belanja modal pembangunan pemerintah daerah sangat penting, karena belanja modal merupakan salah satu komponen utama dalam

¹⁶<https://bkpm.go.id>, diakses pada 29 Juni 2021 pukul 04.06 WIB.

belanja langsung pemerintah yang dapat mempercepat proses pembangunan daerah. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah maka upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi daerah dengan nilai tambah yang tinggi sangatlah penting untuk meningkatkan output total daerah. Dengan memaksimalkan biaya belanja pemerintah dengan bijak diharapkan dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi.

Gambar 1.6
Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
Tahun 2018-2020
(Miliar Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS, data diolah)¹⁷

Dari gambar 1.5 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 33.961,20 miliar dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 39.199.18 miliar. Untuk tahun 2020 pengeluaran pemerintah mencapai Rp. 46.095.26. Pengeluaran pemerintah Provinsi Banten dalam 3 tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah mencapai Rp. 11.362.380.965 dan pada tahun 2019

¹⁷<https://bps.go.id>, diakses pada 23 April 2021 pukul 10.32 WIB.

dan 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 11.327.955.521 dan Rp. 10.065.546.960. Jika dibandingkan pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat jauh lebih tinggi daripada Provinsi Banten. Keadaan yang dialami oleh Provinsi Jawa Barat menyebabkan realisasi pengeluaran pemerintah daerah yang besar dan belum mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Menurut penelitian terdahulu mengenai angkatan kerja yang dilakukan oleh Yulina Eliza, bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana dengan terjadinya peningkatan angkatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹⁸ Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Aminah, Yenni Del Rosa dan Jolianis bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai nilai investasi maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Merri Anitasari dan Ahmad Soleh, bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Bengkulu, jika pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17 % per tahun.²⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh dari empat faktor yang meliputi angkatan kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memilih judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten”**.

¹⁸ Yulina Eliza, Pengaruh Investasi, angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat, *Pekbis Jurnal*, Vol. 7 No.3 Tahun 2015, hal. 209.

¹⁹ Aminah, Yenni Del Rosa dan Jolianis, *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Padang*, (Bengkulu: jurnal Unpad), hal. 9.

²⁰ Merri Anitasari dan Ahmad Soleh, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu: Ekombis review), hal. 126.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang tidak stabil pada tahun 2018-2021.
2. Angkatan kerja Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang mengalami kenaikan dan penurunan dari 2018-2020.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang tidak stabil pada tahun 2018-2020.
4. Investasi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten baik yang berasal dari PMA maupun PMDN yang mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2018-2020.
5. Pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang mengalami kenaikan dan penurunan dari 2018-2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan data diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan tambahan wawasan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Selain itu, juga untuk pengembangan mata kuliah ekonomi makro yang berhubungan dengan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Informasi bisa dipakai untuk bahan masukan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka sebagai pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan angkatan kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, investasi dan pengeluaran pemerintah. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Publik

Penelitian ini dapat memberikan informasi pentingnya pertumbuhan ekonomi dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada variabel *independent*/ bebas (X) dan variabel *dependent*/ terikat (Y). Penelitian ini memiliki 4 variabel bebas yaitu angkatan kerja (X1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (X2), Investasi (X3), pengeluaran pemerintah (X4), dan satu variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Ruang lingkup penelitian ini mengambil wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara data *cross*

section dan data *time series* dalam 5 tahun. Selain itu, dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang digunakan hanya 4 variabel, yaitu angkatan kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, investasi, pengeluaran pemerintah.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman memudahkan menelaah dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1) Definsi Konseptual

a. Angkatan Kerja

Menurut BPS Angkatan Kerja (*laboyr force*) adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja dan tidak bekerja tetapi siap untuk mencari pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang termasuk sebagai angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan golongan menganggur dan mencari pekerjaan.²¹

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruuto (PDRB) atas dasar harga berlaku adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan. Penilaian tersebut dilakukan baik terhadap produksi maupun biaya antara (*intermediate input*).²²

c. Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan

²¹ Yunita Bella David, Daisy S.M Engka dan Jacline I. Sumual, Pengaruh Angkatan Kerja Bekerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, Vol.7 No.8 Tahun 2019, hal 3391.

²²<http://bappeda.lamandaukab.go.id> diakses pada 30 juni 2020 pukul 23.11 WIB.

keuntungan dimasa-masa yang akan datang.²³

d. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.²⁴

h. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.²⁵

2) Definisi Operasional

Untuk memberikan arah pada penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional atas variabel penelitian sebagai berikut:

- a. Angkatan kerja, tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja berumur 15 tahun keatas yang bekerja.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.
- c. Investasi, diukur dengan jumlah proyek investasi PMDN dan PMA yang telah terrealisasi.
- d. Pengeluaran pemerintah, perkembangan pengeluaran pemerintah diukur melalui besarnya belanja langsung dan tidak langsung yang digunakan dalam sistem penganggaran pemerintah.
- e. Pertumbuhan ekonomi, tolak ukur perekonomian suatu negara adalah PDB sebagai gambaran total produksi barang dan jasa yang dihasilkan

²³ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal: Edisi Kelima*, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), hal.4.

²⁴<https://www.abstraksiekonomi.com/2013/11/teori-pengeluaran-pemerintah.html?m=1>, diakses pukul 04.37 WIB tanggal 28 April 2021.

²⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 12.

negara dalam satu periode. Sedangkan, nilai PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki daerah.

H. Sistematika Skripsi

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari enam bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar bisa dipahami dengan jelas. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan singkat mengenai apa yang akan dibahas pada penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, teori yang dipaparkan terdiri dari teori yang membahas variabel/ sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/ sub variabel kedua, dan seterusnya, menguraikan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang di dalamnya membahas mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jawaban dari masalah penelitian dan menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada sehingga dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan atas hasil penelitian pada bab selanjutnya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran peneliti bagi lembaga/ perusahaan dan peneliti selanjutnya berdasarkan analisis data dan penemuan di lapangan.